

**TESIS**

**PEMENUHAN HAK ATAS JAMINAN KESEHATAN TERHADAP PEKERJA  
SWASTA DENGAN STATUS *PROBATION* ATAU MASA PERCOBAAN DI  
KOTA PADANG**

**Diajukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum  
Pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum**



**OLEH:**

**SHERLY MUTYA**

**NIM : 2120113003**

**PROGRAM STUDI : MAGISTER HUKUM**

**KOSENTRASI : HUKUM KESEHATAN**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS**

**2023**

**PEMENUHAN HAK ATAS JAMINAN KESEHATAN TERHADAP PEKERJA  
SWASTA DENGAN STATUS *PROBATION* ATAU MASA PERCOBAAN DI  
KOTA PADANG**

**(Sherly Mutya, 2120113003, Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum,  
Universitas Andalas, 2023)**

**ABSTRAK**

Pemenuhan hak pekerja berupa jaminan kesehatan merupakan program yang sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar. Diwujudkan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional mengatur tentang hak dasar atas rasa aman yang dimiliki oleh pekerja/karyawan. Diantaranya, hak atas kesejahteraan mencakup program jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan kematian (JKM), dan jaminan hari tua (JHT). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1). Bagaimana Pengaturan Atau Perlindungan Atas Jaminan Kesehatan Terhadap Pekerja Swasta Dengan Status Probation Atau Masa Percobaan Di Kota Padang?, 2) Faktor yang Berperan Dalam Pemenuhan Hak Atas Jaminan Kesehatan Terhadap Pekerja Dengan Status Probation Atau Masa Percobaan di Kota Padang?. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang memfokuskan kajiannya dengan memandang hukum sebagai suatu sistem yang utuh, mencakup seperangkat asas hukum, norma hukum, dan aturan hukum, dalam penelitian ini selain menggunakan data sekunder juga menggunakan data empiris, namun tidak menghilangkan sifat penelitian ini sebagai penelitian normatif. Hasil penelitian ini adalah : 1) Tidak terimplementasinya Undang-undang dan semua aturan yang mengatur tentang jaminan kesehatan terhadap pekerja swasta dengan status Probation secara menyeluru, 2) Harus ada kebijakan yang di keluarkan pemerintah secara tegas perihal sanksi yang diberikan apabila pekerja tidak mendapatkan jaminan kesehatan.

***Kata kunci : Jaminan Kesehatan, Pekerja, Masa Percobaan/Probation***

**FULFILLMENT OF THE RIGHT TO HEALTH INSURANCE FOR PRIVATE  
WORKERS WITH PROBATION STATUS OR *PROBATION* PERIOD IN  
PADANG CITY**

**(Sherly Mutya, 2120113003, Master of Law Study Program, Faculty of Law,  
Andalas University, 2023)**

**ABSTRACT**

The fulfillment of workers' rights in the form of health insurance is a program in accordance with the mandate of the Constitution. Realized through Law of the Republic of Indonesia Number 40 of 2004 concerning the National Social Security System regulates the basic rights to a sense of security owned by workers /employees. Among them, the right to welfare includes health insurance programs, work accident insurance (JKK), death insurance (JKM), and old age insurance (JHT). The formulation of the problem in this study is: 1). How is the arrangement or protection of health insurance for private workers with probation status or probation period in Padang City?, 2) Factors that play a role in fulfilling the right to health insurance for workers with probation status or probation period in Padang City?. This research uses normative juridical methods that focus their studies by viewing law as a complete system, including a set of legal principles, legal norms, and legal rules, in this study in addition to using secondary data also using empirical data, but does not eliminate the nature of this research as normative research. The results of this study are: 1) Non-implementation of the Law and all regulations governing health insurance for private workers with Probation status in general, 2) There must be a policy issued by the government strictly regarding the sanctions given if workers do not get health insurance.

***Keywords : Health Insurance, Worker, Probation/Probation***